

ABSTRAK

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas di berbagai fasilitas umum, termasuk bioskop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa dalam penggunaan fasilitas umum di Bioskop Cinepolis Jember, yang diatur melalui Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas di Bioskop Cinepolis Jember, seperti ramp, toilet khusus, dan ruang ramah kursi roda, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya perhatian pemerintah daerah dan pengelola bioskop terhadap aksesibilitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan fasilitas, penegakan regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola fasilitas umum, dan organisasi disabilitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mewujudkan fasilitas umum yang lebih inklusif dan nyaman bagi penyandang disabilitas.

Keywords: Aksesibilitas, Fasilitas Umum, Disabilitas,



ABSTRACT

Accessibility rights for persons with disabilities are part of human rights guaranteed in various regulations, both at the national and regional levels. In Indonesia, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities has mandated the government, the business world, and the community to provide proper accessibility for persons with disabilities in various public facilities, including movie theaters. This study aims to determine the implementation of accessibility rights for persons with disabilities in the use of public facilities at Cinepolis Jember Cinema, which is regulated through Article 18 of Jember Regency Regional Regulation No. 7 of 2016. The research method used is empirical juridical with statutory and conceptual insights. The results showed that the facilities at Cinepolis Jember Cinema, such as ramps, special toilets, and wheelchair-friendly rooms, have not fully met the needs of persons with disabilities. The obstacles identified include the lack of attention of the local government and cinema managers to accessibility. To address this issue, facility upgrades, regulation enforcement, and collaboration between the government, public facility managers, and disability organizations are needed. These steps aim to make public facilities more inclusive and comfortable for people with disabilities.

Keywords: *Accessibility, Public Facilities, Disabilities*

